

SINOPSIS

Pemilukada ini lebih menekankan kepada proses kampanye, yaitu Pilkada Kabupaten Bantul dianggap belum menunjukkan aspek keterbukaan dalam bekerjasama. Selain itu, pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh oknum pasangan calon, telah melanggar ketentuan yang diterapkan oleh KPU dan Panwalsu Kabupaten Bantul. menjadi pertanyaan bagi penulis bagaimana kinerja KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2015.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan fakta-fakta yang digali dari objek penelitian tentang Analisis Kinerja KPUD Kabupaten Bantul Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015. Adapun data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Metode dalam pengumpulan data skripsi ini adalah interview atau wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan menuturkan dan menggambarkan kemudian ditafsirkan serta diintegrasikan secara sistematis, adapun yang diwawancarai adalah Ketua KPU Kabupaten Bantul Muhammad Johan Komara, S.IP beserta Anggota Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bantul Arif Widayanto, S.FIL.I dan diwawancarai perwakilan satu orang dari anggota Panwaslu Kabupaten Bantul atas nama Nuril Hanafi, ST.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja KPUD Kabupaten Bantul sudah sesuai prosedur yang berlaku, serta bisa dikatakan berjalan dengan baik dalam semua tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan, yang paling pokok yaitu system informasi dalam tahapan, pelaksanaan informasi Pilkada melalui system informasi pencalonan dan menggunakan system informasi penghitungan. Selanjutnya membuat laporan, laporan yang pertama ialah membuat laporan dalam bentuk buku yaitu buku rakyat bantul memilih dalam buku itu kita tuangkan dari tahap proses awal hingga tahap akhir terlaksananya pilkada, yang kedua laporan keuangan kegunaan anggaran. Jadi ada dua besar laporan kepada Pemda termasuk kepada KPU RI

Sedangkan saran yang dapat penulis sajikan adalah, bahwa kejelasan regulasi, harmonisasi antar regulasi seperti PKPU dengan Permendagri terkait pengaturan keuangan, juga menjadi hal yang wajib ada pada penyelenggaraan Pemilihan maupun Pemilu periode mendatang, agar tidak terjadi lagi situasi serupa.

ABSTRAK

Pemilukada is more stressed to the campaign process, namely the elections Bantul Regency is considered have yet to demonstrate aspects of openness in cooperation. In addition, violations of the campaign props installation does not match the procedure carried out by the candidate, the person has violated the provisions applied by the ELECTION COMMISSION and Panwalsu Districts of Bantul. a question for the author how the performance Bantul Regency in organizing Regional Deputy Chief and Pemilukada concurrent Year 2015. In this study, the authors used this type of research is qualitative research mendiskripsikan the facts unearthed from the object of research on performance analysis NOVEMBER Bantul Regency In Concurrent Year 2015 Pemilukada.

As for the data being used is the primary data and secondary data. Method of data collection in this thesis is an interview or an interview and documentation, as well as the data analysis techniques used to speak and the lyrics then interpreted and diintefikasi systematically, as for who was interviewed was Chair of the Bantul district ELECTION COMMISSION Muhammad Johan Komara, s. IP along with members of the Organization of the Technical Division Katua Bantul Regency Arif Widayanto, s. FIL. I and interviewed representatives of one of the members of Panwaslu Bantul Regency on behalf of Nuril Hanafi, ST.

Based on the results of the research the author can be drawn the conclusion that the NOVEMBER Performance Bantul Regency is in compliance to applicable procedures, as well as dikatakan could run well in all stages of the preparation and implementation phases, the most principal i.e. the system information in phases, the implementation of the information system through Elections and nomination information using a system of numbering information. Next make a report, the report is the first report in book form i.e. the book people of bantul chose in that book we pour from the early stages of the process up to the final stages of the implementation of the elections, the second financial report usability budgets. So there are two major reports to the regional ELECTION COMMISSION including RI.

While suggestions that may the author serve is, that the clarity of the regulation, harmonization between such regulation PKPU with the financial settings, related Permendagri also is required on the Organization of the Elections as well as elections of the coming period, to avoid similar situations from happening again.